

Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Dikabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)

by Eko Priyo Purnomo

Submission date: 06-Jun-2018 10:02AM (UTC+0700)

Submission ID: 972845835

File name: DPRD_Etnis_Bugis_Dikabupaten_Indragiri_Hilir,_Provinsi_Riau.pdf (182.53K)

Word count: 5866

Character count: 37652

Hapsa

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan
Politik Nurdin Hamzah
Email: Hapsa_cha@yahoo.co.id

Eko Priyo Purnomo

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Eko@umy.ac.id

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2016.0053](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0053)

Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)

ABSTRACT

Bugis ethnic group who live in Indragiri Hilir an ethnic immigrants, with the number of 150 816 inhabitants, ranks third after the ethnic Malay and Banjar. However, ethnic Bugis able menjalain power relations appropriately. Evidenced by the position of ethnic Bugis located in strategic places Inhil got various fields, especially in the legislature. This study used a descriptive approach, the data collection technique interview legislators who are ethnic Bugis and other stakeholders. Power relation with the theoretical approach of the reproductive power Pierre Bourdieu, showed that the participant a the very keeping and maintaining ethnic identity inherited from their ancestors, so that they are able to create habitus attached to its identity, as well as the domains and symbolic capital gained by establishing a relationship together political parties, ethnic Java and regional organizations

Keywords: power, identity, Bourdieu's theory, ethnic Bugis

ABSTRAK

Etnis Bugis yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan etnis pendatang, dengan jumlah 150.816 jiwa, urutan ketiga setelah etnis Melayu dan Banjar. Akan tetapi, etnis Bugis mampu menjalain relasi kuasa dengan tepat. Terbukti dengan kedudukan etnis Bugis yang berada di Inhil mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara anggota DPRD yang beretnis Bugis dan stakeholders lainnya. Relasi kuasa dengan pendekatan teori reproduksi kekuasaan Pierre Bourdieu, menunjukan bahwa keleompok tersebut sangat menjaga dan mempertahankan identitas etnis yang diwariskan dari leluhurnya, sehingga mereka mampu menciptakan habitus yang melekat pada identitasnya, serta ranah dan modal simbolik yang diperoleh dengan menjalain relasi bersama partai politik, etnis Jawa, dan organisasi kedaerahan

Kata kunci: Kekuasaan, identitas, teori Bourdieu, etnis Bugis.

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari beragam etnis, Jawa, Banjar, Bugis, Minang, Medan, dan lain-lain, dengan penduduk asli yaitu suku Melayu dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 209.659 jiwa. Sedangkan etnis Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan

menepati posisi ketiga dengan jumlah kependatan penduduk yaitu 150.816 jiwa setelah etnis Banjar 185.093 jiwa yang berasal dari Kalimantan (Inhil dalam angka, 2013).

Kedatangan etnis Bugis di Kabupaten Inhil bermula pada abad ke 17 (Linneton, 1973), di mana masyarakat etnis Bugis dikenal sebagai perantau tulen, baik dengan belayar, mengembara, berdagang yang merupakan suatu tradisi utuh dalam kehidupan mereka (Sarkawi, 2011). Sehingga, orang-orang Bugis selalu berupaya mencari tempat yang dianggap layak bagi dirinya untuk tinggal, bekerja, bermasyarakat dan bertahan hidup. Sebagai suku yang terkenal dalam aktivitas berlayar didunia maritim, suku Bugis juga piawai dalam mengelolah lahan pertanian dan perkebunan, dibuktikan dengan jumlah profesi petani masyarakat bugis berkisar 57% (Mukhlis, 2015). Sehingga tidak mengherankan salah satu wilayah yang dituju yaitu tanah melayu, tepatnya Idragiri Hilir Provinsi Riau, yang dikenal sebagai daerah kepulauan dan memiliki kebun kelapa terluas senusantara yaitu 3,7 juta hektar (Inhilkab.go.id).

Seiring dengan keberadaanya ditanah melayu tersebut, etnis Bugis mendapat posisi berbeda dengan etnis lainnya, terbukti dengan persentasi pekerjaan yang dilakoni yaitu sebesar 78% masyarakat inhil memiliki pekerjaan (KKSS Inhil 2015). Serta jarang sekali etnis Bugis menjadi kuli atau pekerja pada kelompok lain, sebaliknya rata-rata etnis tersebut memperkerjakan etnis lain dalam mengelola kebun yang dimiliki. Hal ini tidak terlepas dari sejarah awal kehadiran generasi pertama yang piawai dalam membuka lahan baru untuk diolah dengan semangat *siri'* dan tanggung jawab yang besar. Sehingga pola hidup tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dengan profesi yang dijalankan sebagai pemilik kebun (Rafiuddin, 2011).

Perubahan pola hidup menuju perbaikan yang bertahap juga dialami oleh kelompok etnis bugis di Inhil, terbukti dengan adanya perubahan pola profesi pekerjaan yang mulai lebih beragam,

126 terutama dibidang birokrasi dan perpolitikan di Kabupaten Indragiri Hilir (Rafiuddin, 2011). Dimana pada abad ke 17 sampai pada tahun 1960an belum ada dijumpai etnis Bugis yang berkontribusi dalam dunia politik di Inhil (KKSS Inhil 2015). Pada konteks sosial dan politik kelompok etnis bugis mulai memainkan dan mengambil perannya dengan baik dikedua bidang ini, terbukti dengan hampir dijumpai etnis Bugis disetiap instansi pemerintahan dan lembaga politik, yaitu sebesar 12% (KKSS Inhil 2015). Berperan aktif dalam lembaga legislatif membuktikan kelompok tersebut mampu bersaing dengan masyarakat asli dan etnis pendatang lainnya yang jumlahnya lebih mayoritas. *Bargaining position* kelompok etnis bugis dilembaga legislatif mendapat tempat yang strategis, dibuktikan dengan empat periode berturut-turut yaitu periode 1999, 2004, 2009, 2014, mereka mampu memperoleh kursi yang representatif dan tiga periode sebagai ketu umum DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan membahas posisi etnis tersebut dalam membangun relasi kuasa dengan kekuatan identitas etnis yang dimiliki, sehingga mampu mencapai kelas sosial yang strategid dalam lembaga legislatif, sesuai dengan teori reproduksi kekuasaan *Pierre Bourdieu*. Diawal, makalah ini memaparkan gagasan teori relasi kuasa sebagai bentuk kerangka investigatif dan terminologi modal kultural dan identitas etnis yang dipertahankan. Kemudian pada bagian selanjutnya memaparkan dan menjelaskan relasi dari perilaku yang melekat pada identitas mereka terhadap ranah didalam posisi dilembaga legislatif.

KERANGKA TEORI RELASI KUASA

Piranti kekuasaan diandaikan terbentuk dalam sebuah topografi ruang sosial, maka ruang sosial terdiri dari berbagai ranah yang berbeda dan saling terkait. Perwujudan kekuasaan yang dominan memerlukan perangkat-perangkat simbolik untuk melegitimasi

kekuasaan tersebut. Artinya dominasi kekuasaan tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya akumulasi modal (modal ekonomi, sosial, kultural, maupun simbolik). Semakin besar volume modal yang dimiliki seseorang atau instansi, semakin besar pula kekuasaan yang diwujudkan. Dengan demikian kekuasaan, sangat dipengaruhi oleh konsepsi ranah (field), persepsi (habitus), kapital, dan praktek sosial (Bourdieu dalam Fashri, 2007: 21).

Terkait dengan relasi kekuasaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Indragiri hilir dengan politik identitas yang dimiliki, Pierre Bourdieu menyebutkan kerangka investigatif dan terminologi seperti modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik, serta konsep habitus, ranah (field) atau lokasi, dan kekerasan simbolik untuk mengungkapkan dinamika relasi kuasa dalam kehidupan sosial.

Mekanisme Reproduksi Kekuasaan Pemikiran Pierre Bourdieu Bourdieu dalam Sjaf (2014) beranggapan dalam membangun jaringan kekuasaan, realitas etnik memiliki pengaruh dimana etnisitas merupakan sejarah yang tidak dapat dipungkiri dan memberikan sumbangan terhadap habitus aktor.

HABITUS

Menurut Pierre Bourdieu dalam Takwim (2006: 44) interaksi manusia dengan habitus senantiasa melekat, tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi dan melebur, berbeda dengan pendapat Aristoteles dalam Fashri (2007: 84) habitus sebagai kategori dari hal-hal yang melengkapi subjek sebagai substansi, hal yang ada pada dirinya sendiri, hal yang keberadaannya hanya untuk dirinya sendiri, hal yang adanya dapat dipilah dari hal lain.

“Dalam pengertian Bourdieu, habitus sebagai perlengkapan dan postur sebagai posisi tubuh/fisik, juga kualitas sebagai sifat-sifat yang menetap dalam diri, tidak dapat dipilih karena perlengkapan menghasilkan postur yang lama kelamaan membentuk sifat yang relative menetap”

Kemudian beberapa prinsip yang menjadi ciri khas habitus

128 Bourdieu. *Pertama*, habitus mencakup dimensi kognitif dan efektif yang terjawantahkan dalam sistem disposisi. *Kedua*, habitus merupakan “struktur-struktur yang di bentuk” (structured structure) dan “struktur-struktur yang membentuk” (structuring structure). *Ketiga*, habitus dilihat sebagai produk sejarah. Sebagaimana pernyataan Bourdieu dalam Ritzer (1996: 404) Melalui pemahaman ini, Bourdieu menyangkal pemahaman yang menganggap habitus sebagai kodrat alami yang tak terelakkan atau sebagai pelengkap semata.

Sehingga dalam kasus penelitian ini, perlu dipahami bagaimana habitus anggota DPRD yang beretnis Bugis, serta yang membedakan karakter dirinya dan yang lain, kecenderungan-kecenderungan apa yang berlaku pada dirinya sehingga dipandang dengan pandangan yang berbeda dalam kehidupan sosial. Dalam menghadapi kehidupan sosial, dalam penelitian ini mengkaji bagaimana habitus aktor tersebut terbentuk, baik itu pengalaman hidup aktor, asal-usul, budaya yang dimiliki, latar belakang pekerjaan, latar belakang sejarah, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Maka dari terbentuknya habitus tersebut dapat dilihat kekuatan relasi kuasa yang terjadi.

RANAH (*FIELD*)

Konsep *habitus* tidak dapat dipisahkan dari ranah perjuangan (*champ*). Dua konsep ini sangat dasar karena saling mengandaikan hubungan dua arah. Bourdieu dalam Ritzer (2009: 405) lebih memandang “arena” sebagai relasional ketimbang secara struktural. Arena adalah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya, yang menduduki posisi bisa jadi merupakan aktor atau institusi, dan mereka dihambat oleh struktur ranah. Bourdieu melihat arena, menurut definisinya sebagai arena pertempuran: “arena juga merupakan arena perjuangan”. Arena adalah sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya terdapat berbagai jenis modal, seperti modal ekonomi, kultural, sosial dan simbolis. Hal ini menunjukkan bahwa realitas masyarakat yang terdiferensiasi itu, lingkup hubungan-

hubungan objektif mempunyai kekhasan yang tidak bisa begitu saja 4 reduksi pada hubungan yang mengatur bidang lain. Karena itu, pemikiran Bourdieu yang mengatakan bahwa dalam semua masyarakat ada yang menguasai dan dikuasai, menjadi bermakna. Dalam perbedaan ini terletak prinsip dasar pengorganisasian sosial. Namun, menurutnya dominasi ini sangat tergantung pada situasi, sumber daya, dan strategi pelaku (Bourdieu dalam Ritzer, 2009: 405). Setiap aktor dalam hal ini yaitu anggota DPRD Kabupaten Indragiri hilir, selalu dihadapkan pada arena-arena yang masing-masing memiliki aturan atau aturan yang kemudian mempengaruhi bagaimana nantinya individu atau kelompok, serta perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap aktor-aktor tersebut.

MODAL (*CAPITAL*)

Menurut Haryatmoko (2003), para pelaku 5 menempati posisi-posisi masing-masing yang ditentukan oleh dua dimensi: pertama, menurut besarnya modal yang dimiliki; dan kedua, sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka. Menurut Bourdieu dalam Haaryatmoko (2003) modal-modal tersebut dapat digolongkan menjadi empat golongan, yakni: (1) Modal ekonomi, yang mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya; (2) Modal budaya kultural, yang mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Misalnya kemampuan menampilkan diri di depan publik, pemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, juga sertifikat (gelar keserjanaan); (3) Modal sosial, menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kuasa; dan (4) Modal simbolik, mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi.

130 IDENTITAS ETNIS KONSEP IDENTITAS MANUAL CASTELLS

Menurut Castells dalam Solissa (2010: 7) Identitas merupakan hasil konstruksi, dimana konstruksi identitas pada dasarnya hasil dari suatu susunan, yang bersumber pada macam-macam sejarah, geografi, biologi, institusi produktif dan reproduksi (Castells dalam Irawan, 2012: 37). Namun, individu maupun kelompok sosial masyarakat berproses dalam semua bentuk material tersebut, berdasarkan kondisi sosial, proyek budaya yang berasal dari struktur sosial, kerangka ruang dan waktu. Jika dikaitkan dengan konstruksi identitas etnis Bugis yang ada di Kabupaten INHIL, yang berproses dalam melalui semua material tersebut, yang berakar dari struktur sosial, ruang, dan waktu yang dilalui kelompok etnis Bugis INHIL.

PERAN ETNIS DAN POLITIK

Sjaf (2014:13) identitas merupakan produk sosial yang berisi konsep relasional yang terkait dengan identifikasi di (subjektivitas) dan rasionalitas sosial (objektivitas). Dengan demikian identitas etnik dipahami sebagai proses penciptaan batas-batas formasi dan ditegakan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik. Ivenda, dkk (2001) memberikan artikulasi bahwa identitas etnik diciptakan oleh proses sejarah yang menggabungkan kelompok-kelompok sosial yang berbeda ke dalam suatu struktur politik yang tunggal di bawah kondisi-kondisi sosial tertentu. Dalam hal ini Bourdieu dalam sjaf (2014) sepakat bahwa identitas etnik merupakan hasil dan modal konstruksi sosial yang dibangun antar obyek. Dengan demikian, kekuatan identitas etnik adalah kuasa (power) yang melekat pada etnik dan dijadikan sebagai sarana aktor melakukan pengorganisasian atau mobilisasi massa dalam arena kehidupan, termasuk arena politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang dianggap representatif yang benar-benar mewakili sifat populasi. Sehingga diperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Berikut narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ketua DPRD Kabupaten Inhil : 1 orang
2. Anggota DPRD Kabupaten Inhil beretnis Bugis : 9 orang
3. Anggota DPRD Kabupaten Inhil non etnis bugis : 3 orang
4. Ketua/staff KPUD Kabupaten Inhil : 1 orang
5. Ketua KKSS Kabupaten Inhil : 1 orang
6. Anggota KKSS Kabupaten Inhil : 3 orang
7. Masyarakat etnis Bugis (6 Kec.dari 12 Kec):3org/kec:18 orang
8. Masyarakat non Bugis (3 Kec dari 12 Kec) : 3org/kec:9 orang

Metode kualitatif dimana proses pengumpulan data dan analisis berlangsung selama dan paska pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil studi (Salim, 2006: 22). Sehingga sebagaimana pernyataan Miles dan Huberman dalam Salim (2006) analisis data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

PEMBAHASAN

HABITUS DALAM MEMBENTUK RELASI KUASA ETNIS BUGIS DI LEMBAGA LEGISLATIF

Habitus atau sikap yang tercipta saat ini merupakan hasil struktur mental atau kognitif yang diperoleh oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) Provinsi

132 Riau yang beretnis atau bersuku Bugis. Sehingga mereka mampu memperoleh pencapaian diranah politik dengan modal simbolik yang diperoleh, berupa jabatan dan kedudukan sebagai anggota DPRD di Kabupaten INHIL pada saat ini, bersumber dari pandangan terhadap masyarakat etnis Bugis secara umum di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL). Habitus yang ada saat ini, juga diperoleh sebagai akibat dan rentan waktu lamanya proses yang dilewati dalam kehidupan sosial yang dijalani tiap-tiap individu anggota DPRD ini, serta tidak bisa terlepas dari prilaku dan pola hidup masyarakat etnis Bugis yang ada di Kabupaten Inhil, dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut tentu juga diperoleh melalui pengalaman hidup yang mempunyai fungsi-fungsi dan makna tertentu.

Demikian hal serupa disampaikan oleh Ibu Okta Hasanatang (Komisi III anggota DPRD Inhil), Bahwa etnis Bugis yang menetap dan bordomisili di Inhil yang sekarang merupakan generasi ke 5 (lima), yang mana mampu memiliki kontribusi dan peran aktif dalam sistem pemerintahan di Inhil khususnya pada lembaga legislatif yaitu DPRD Kabupaten, tidak terlepas dari peran pendahulu atau nenek moyang yang tetap membawa dan mempertahankan nilai-nilai budaya Bugis dalam hal ini “Etos Kerja”.

Habitus yang berbentuk habitual berupa etos kerja yang tinggi, tidak bisa terlepas dari identitas etnis Bugis yang merupakan tata pembawaan khas terkait dengan kondisi tipikal gestur dan kinerja. Beliau sangat merasakan sekali dampak tersebut, tidak di pungkiri hal utama yang menjadi faktor eksternal, dan merupakan perlengkapan bagi substansi yang mengantarkan beliau duduk di kursi parlemen yaitu etos kerja yang ditanamkan sejak dini. Bermula dari *latok* atau *datuk* bagi orang melayu yang pertama kali menginjakkan kaki ke Inhil dimana saat itu bisa diprediksi keadaan alam yang belum stabil, dengan kemampuan membuka lahan berdasarkan pengalaman dari Sulawesi Bone, diteruskan oleh

generasi selanjutnya dengan tidak melalaikan pendidikan formal. Belau sendiri besar dari keluarga pekerja keras sarta besar dilingkungan kelompok etnis Bugis yaitu Kecamatan Tanah merah (Desa Kualaenok), sehingga terbiasa menyaksikan keseharian yang penuh dengan semangat kerja memacu beliau untuk terjun ke dunia politik yang juga membutuhkan pengorbanan dan kerja keras yang maksimal (Wawancara Ibu Okta Hasanatang). Setidaknya ia telah memiliki modal besar, berupa identitas diri dengan habitus yang dibangun dari teori produksi sosial para pelaku yang terlibat (keluarga dan masyarakat setempat beretnis sama) sebagai acuan logika bertindak.

Terjadi sinkronisasi dengan pernyataan Okta Hasanatang dan dijamin oleh beberapa anggota DPRD Inhil lainnya yaitu Bapak Sabit Bahar (Komisi III DPRD Inhil), dan Bapak M.Wahyuddin (Komisi II anggota DPRD Inhil) kebiasaan dan ciri khas mereka, merupakan bentuk habitus yang dihasilkan dari latar belakang keluarga Bugis dan lingkungan budaya Bugis, dengan penerapan budaya yang serupa. Habitus yang melekat dalam kepribadian identitas etnis Bugis juga melekat pada diri mereka dan anggota DPRD yang beretnis Bugis lainnya, terbukti pada periode sekarang dan periode-periode sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Inhil yang bersuku Bugis bisa mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat Inhil, terlihat dari jumlah kursi yang diatas 20%.

DIMENSI KOGNITIF DAN EFEKTIF DALAM KESEHARIAN ETNIS BUGIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kecendrungan bentuk dimensi kognitif dan efektif terbentuk melalui praktik atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat etnis Bugis yang tinggal dan menetap di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) dengan pengalaman personalnya. Berpuluh tahun dari generasi kegenerasi saling berinteraksi dengan individu dan orang lain yang berbeda disekelilingnya, serta dengan struktur objektif yang terdapat

134 dilingkungannya. Kecendrungan ini dipupuk didalam posisi-posisi sosial pada ranah sosial yang sama, dan kemudian terciptalah kerangka penyesuaian subjektif yang disepakati oleh kelompok-kelompok atau individu tertentu terhadap posisi sosial tersebut.

Disposisi atau kecendrungan dalam habitus yang berdimensi kognitif dan efektif, merujuk pada tiga makna. *Pertama*; Disposisi sebagai hasil dari tindakan yang mengatur. Tidak ada regulasi hukum yang mengatur secara rinci ataupun secara umum perilaku yang harus diterapkan etnis Bugis dalam hidup bersosialisasi baik di lingkungan asal (Sulawesi Selatan) ataupun ditanah perantauan dimanapun mereka berada. Apalagi aturan yang mengakibatkan adanya *punishment* yang berbentuk hukuman pidana atau perdata, kecuali bagi perilaku yang memang melanggar hukum-hukum pidana dan perdata (pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya). Akan tetapi nilai-nilai adat menjadi sebuah patokan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat etnis Bugis sebagai sebuah simbol identitas yang tidak dapat digadaikan, sehingga muncul bentuk-bentuk disposisi yang melekat pada kehidupan mereka. Jika hal tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, akan menjadi beban moral tersendiri sebab pandangan dan tanggapan dari lingkungan yang dianggap negatif serta kesadaran dari individu itu sendiri.

Kedua; disposisi merujuk pada cara menjadi (*a way of being*) pada kondisi habitual, dimana habitus yang merupakan kebiasaan atau kekhasan dari etnis Bugis, menjadi salah satu langkah proses untuk mencapai suatu tujuan yang memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap mendominasi, dan dianggap positif dalam kelompok sosial tersebut. Menurut Rafiuddin (2011). Sampai saat ini, kecendrungan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis berkisar 75% persen (KKSS INHIL 2015) masyarakat INHIL memiliki pekerjaan yang dianggap layak. Data tersebut menggambarkan disposisi awal kedatangan yang telah

berlangsung puluhan tahun lamanya, dengan langkah awal berinisiatif mengambil alih dunia pertanian dan jasa (sebagai Ustads yang disegani) dengan memanfaatkan keahlian yang diperoleh dari tanah asal dan menerapkannya di tanah rantauan, menjadi rujukan dan penentu bagaimana posisi kelas sosial etnis Bugis di Kabupaten INHIL kedepannya.

Dari kedudukan sosial sebagai tuan tanah, yang berawal dari etos kerja kedatangan di tanah Indragiri Hilir, membuka lahan dan mengelolanya sebagai ladang pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang *out come* atau efek jangka panjangnya dirasakan dari generasi kegenerasi. Sehingga bukan hal yang tabu kelompok etnis Bugis di INHIL dikenal sebagai tuan tanah sebagaimana yang dikatakan Iswandi (Alumni UIN Yogyakarta 2015, Masyarakat Kecamatan Reteh, RIAU) dan hasil penelitiannya tentang masyarakat pesisir di INHIL, dimana yang menguasai dunia pertanian, dan perdagangan adalah masyarakat etnis Bugis, sedangkan etnis Jawa, Banjar, atau bahkan etnis asli INHIL yaitu Melayu (Malay) bekerja atau diupah oleh Etnis Bugis. Iswandi mengungkapkan suku-suku tersebut semacam bergantung hidup dengan suku Bugis, sehingga tidak sadar menciptakan 'eksploitasi terselubung' didalam tataran sosial yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di INHIL bagian Selatan.

STRUKTUR YANG DIBENTUK DAN YANG MEMBENTUK PADA HABITUS ⁶ETNIS BUGIS

Kelompok etnis Bugis dan masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dikenal sebagai penganut adat-istiadat yang kuat. Meskipun telah berkali-kali menemui tantangan berat yang ada kalanya hampir menggoyahkan kedudukannya dalam kehidupan dan pikiran mereka. Pada akhirnya adat-istiadat tersebut tetap hidup dan bahkan kedudukannya makin kukuh dalam masyarakat hingga kini, begitupun yang terjadi bagi kelompok masyarakat Bugis yang

136 berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehingga dari bentuk-bentuk nilai tersebut yang mengakar di kehidupan etnis Bugis, mampu menciptakan prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup dan representasi-representasi, yang dapat disesuaikan dengan tujuan-tujuan tanpa mengabaikan pengarahannya secara sadar dan penguasaan secara sengaja untuk pencapaian-pencapaian tertentu dalam sebuah arena sosial. Etnis Bugis mampu membentuk struktur yang kuat terhadap disposisi masyarakat umum atau etnis lain. Kabupaten Indragiri Hilir sendiri yang memiliki masyarakat beragam dan majemuk, dimana etnis Bugis menghadirkan habitus yang berupa hasil keterampilan dan tindakan praktis yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah kemampuan yang kelihatan melekat pada etnis Bugis tersebut.

KEMUNDURAN NILAI-NILAI TERHADAP STRUKTUR YANG DIBENTUK

Degradasi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan sosial tidak dapat dihindari. Perkembangan zaman, kemajuan IPTEK serta keadaan lingkungan serta perubahan kondisi alam mengakibatkan bergesernya pula nilai-nilai budaya yang selama ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Bugis yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Beberapa generasi sekarang ini mengalami kemunduran dalam pemahaman moral, karakter dan tingkah laku serta daya kreatifitas. Terbukti dengan maraknya berbagai kasus yang terjadi, salah satu pergeseran nilai yang dominan terjadi pada kalangan etnis Bugis di Inhil yaitu menurut Andi (supir mobil 2015) melekat dipemikiran masyarakat salah satu bentuk kejahatan sosial dan pidana yaitu *perampokan* selalu diidentikan pelakunya adalah kelompok orang-orang Bugis.

Selanjutnya, penurunan nilai tersebut juga bisa dicermati dari pola hidup etnis Bugis di Inhil dengan melihat kelas sosialnya, dimana tidak jarang dijumpai orang Bugis yang hanya cenderung

mengandalkan jiwa konsumtifnya 'pemalas' serta jiwa kreatifitas berkurang. Hal tersebut mencerminkan penurunan nilai-nilai 'siri' yang menjadi karakter dan pembawaan masyarakat Bugis. Mereka akan sangat tergantung dengan hal-hal yang sudah ada, terutama bentuk pencapaian materi yang telah dimiliki, maka struktur pemikiran tadi akan mengalami krisis kreatifitas dan krisis karakter, karena budaya instan tadi.

PRODUK SEJARAH DALAM MEMBENTUK HABITUS

Etnis Bugis sejak dulu mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan eksistensi masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan dan kejayaan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Ada dua tokoh sentral dari Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone yang keduanya dijadikan patron bagi sukunya masing-masing. Kerajaan Gowa mempunyai tokoh besar Sultan Hasanudin sedangkan Kerajaan Bone memiliki Aru Palaka. Kerajaan Gowa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanudin menyerang Kerajaan Bone dengan alasan penyebaran ajaran Islam, begitu pula sebaliknya. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palakka La Tenri Tatta to Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Kemudian pada akhirnya terciptalah perdamaian antar keduanya, Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan (Wawancara Bapak Burhan sambil membacakan tulisan sejarah Pusaka, 2015)

Fakta-fakta sejarah bahwa hampir semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Bugis Selatan (Sulsel) terbangun dengan didasari oleh perjanjian politik antara kelompok dalam wilayah pemukiman masing-masing untuk mengangkat orang kepercayaan yang amanah sebagai pemimpin atau raja mereka. Dalam hal ini, *habitus* bisa jadi merupakan fenomena kolektif, dia memungkinkan orang untuk

138 memahami dunia sosial kehidupan etnis Bugis, namun keberadaan berbagai *habitus* berarti bahwa dunia sosial dan strukturnya tidak menancapkan dirinya secara seragam pada setiap aktor, yang disebabkan oleh pergeseran-pergeseran struktur Budaya yang telah terbentuk kolektif terjamah oleh pergeseran zaman.

RANAH DALAM RELASI KUASA IDENTITAS ETNIS DI LEMBAGA LEGISLATIF

Ranah yang merupakan arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya-upaya dan strategi untuk memperebutkan modal sosial, yaitu kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Serta upaya untuk memperoleh serta mempertahankan akses dengan hirarki kekuasaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Ranah yang merupakan arena perebutan kekuasaan, mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada di INHIL menuju keuntungan kelas sosial yang akan diperoleh. Struktur ranah yang ada baik ranah dalam kedudukan (*posision*), ranah sebagai arena kekuatan (*Forces*), dan ranah strategi dimiliki oleh etnis Bugis (dijelaskan pada penjelasan berikutnya) yang akan menentukan pencapaian-pencapaian tersebut baik individu maupun kelompok etnis Bugis.

Hal-hal akan dilakukan berdasarkan pada tujuan yang menguntungkan bagi kepentingan etnis tersebut yang tentu akan lebih membawa citra etnis Bugis kearah yang positif. Pencapaian tersebut yang dilakukan oleh kelompok etnis Bugis bergantung pada posisi kelompok tersebut dalam ranah yang akan dikaji pada sub ini.

Habitus yang mendasari terbentuknya ranah, pengakuan terhadap fenomena kolektif yang ada pada kelompok etnis Bugis di Kabupaten Indragiri Hilir dalam berinteraksi dalam memahami dunia sosial untuk melangsungkan perannya sebagai makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai dan karakter budaya khas. Dimana karkter yang melekat pada masyarakat etnis Bugis yang disepakati

berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber baik dari etnis yang sama maupun dari beberapa pernyataan berbagai etnis yang ada di Inhil. Karakter dengan pribadi yang cenderung tahan banting, pekerja keras, etos kerja yang tinggi serta memiliki kedudukan kelas sosial diatas rata-rata, yang mampu menguasai sebagian besar lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten tersebut. Sehingga memperoleh kesepakatan bersama terhadap karakter atau habitus yang tidak lepas dari pengaruh epistemologi sejarah dalam arti mengungkap relevansi parktis pada zamannya (Wawancara Rahman, 2015).

Ranah yang dihadapi pada kelompok etnis Bugis di Kabupaten Inhil yang fokusnya pada masyarakat Bugis yang terlibat dan pelaku dalam memperoleh posisi-posisi didalam lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, menghadirkan berbagai macam potensi yang ada, baik oleh individu maupun kelompok sesuai porsinya masing-masing.

RANAH DALAM JABATAN (*POSITION*)

Posisi atau kedudukan anggota DPRD Kabupaten Inhil, salah satunya dipengaruhi dengan jumlah populasi etnis Bugis yang tersebar diberbagai Kecamatan yang ada di Inhil. Dimana daerah pemilihan yang ada di Inhil dibagi dalam 6 dapil, yang terdiri dari 20 kecamatan dan dikelompokan dengan Kabupaten Indragiri Hilir Utara, Indragiri Hilir Tengah (Kota Madya Kabupaten), Indragiri Hilir Selatan. Adapun rasio tertinggi berdasarkan pengolahan data yang peneliti lakukan, dengan mengalihkan jumlah kursi yang diperoleh berbasis etnis dengan jumlah kursi keseluruhan, kemudian dibagi dengan jumlah persentasi penduduk, terakhir dibagi dengan persen. Total rasio tertinggi selain dari etnis campuran yaitu 0,45, yaitu etnis Bugis dibandingkan dengan etnis lainnya dengan rasio 0,27. Dapat dilahat pada tabel berikut ini

TABEL 1 RASIO PERBANDINGAN JUMLAH SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PER
ETNIS DI INDRAGIRI HILIR

No	Etnis	Jumlah Penduduk		Jumlah DPRD	Rasio (Jum DPRD X Jum Total DPRD)/100
		Jiwa	Persent (%)		
1	Melayu	209.658	30	15	0,23
2	Banjar	182.093	27	9	0,15
3	Bugis	150.816	22	13	0,27
4	Jawa	123.395	16	3	0,08
5	Campuran	77.421	5	5	0,45
TOTAL			100	45	1,00

TABEL 2 POSISI ETNIS BUGIS DALAM KOMISI

No	Komisi	Bidang	Jabatan	Nama	Etnis
1	I	Pemerintahan dan Hukum	Ketua	Yusuf Said	Bugis
			Wakil	Bakri H Anwar	Melayu
			Sekretaris	Muammar	Melayu
2	II	Ekonomi dan Keuangan	Ketua	Ahmad Junaidai	Banjar
			Wakil	Edi Gunawan	Tionghoa
			Sekretaris	M.Gazali	Banjar
3	III	Pembanguna n dan Lingkungan Hidup	Ketua	Iwan Taruna	Melayu
			Wakil	Edy Hariyanto	Bugis
			Sekretaris	Asnawi	Banjar
4	IV	Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Adi Chandra	Bugis
			Wakil	Adriyanto	Banjar
			Sekretaris	Hernawissitas	Tionghoa
5	Badan Pembentukan Perda		Muhammad Sabit		Bugis

Sumber: wawancara Bapak Rahman (Komisi III DPRD Inhil)

Persebaran etnis Bugis berdasarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Dong selaku sekretaris KKSS yang juga merupakan anggota KPUD INHIL, yaitu Inhil Utara 25% atau 37.704,15 jiwa, Inhil tengah 15% berkisar 22.622,49 jiwa, dan Inhil Bagian Selatan

yang dominan etnis Bugis sebesar 60% atau 90.489 jiwa. Sedangkan kedudukan etnis Bugis dalam jabatan di Komisi dapat dilihat seperti dalam Tabel 2.

RANAH DALAM KEKUATAN (*FORCES*)

Ranah yang merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal (modal budaya kultural, modal sosial, dan modal ekonomi). Kekuatan-kekuatan yang ada pada etnis Bugis di Inhil untuk memperoleh akses tertentu yang dapat dikatakan dekat dengan hierarki kekuasaan, termasuk jabatan atau posisi sebagai anggota dewan Kabupaten. Posisi dan kedudukan sebagai anggota dewan yang beretnis Bugis, kemudian posisi mereka dalam komisi, serta posisi mereka dalam daerah pemilihan, hal-hal tersebut merupakan posisi-posisi atau jabatan yang memiliki nilai arena kekuatan (*Forces*).

KEPEMIMPINAN ANGGOTA DPRD YANG BERETNIS BUGIS

Karakter kepemimpinan merupakan bentuk ranah kekuatan yang mengarahkan etnis ini dalam kedudukan atau posisi di legislatif. Menurut Bapak Andi Rusli (Komisi I DPRD Inhil) yang dari intonasi bicara beliau jelas menggambarkan karakter Bugis (logat bahasa) yang dimiliki berintonasi bahasa Bugis yang memiliki ciri sendiri, beliau mengungkapkan kekuatan anggota legislatif yang beretnis Bugis tercermin pada jiwa kepemimpinan atau leadership yang menurut orang Bugis diumpamakan sebagai yaitu berikut mempunyai watak bumi, langit, bintang, angin, tanah, samudera, dan lain-lain.

RELASI DENGAN PARTAI POLITIK

Etnis Bugis berhasil melakukan persebaran yang baik dalam partai politik artinya relasi dengan partai politik berhasil mereka bangun. Terbukti dengan tabel dibawah ini, hampir disemua partai politik yang mengusung anggota DPRD terdapat etnis Bugis, hanya

142 pada partai Hanura, Nasdem, dan PAN saja yang tidak terdapat anggota legislatif beretnis Bugis.

Menurut Ibuk Siti Bungatang (Komisi III DPRD Kab.Inhil) etnis Bugis mempunyai daya tarik bagi partai politik, faktor terkuat salah satunya yaitu habitus yang melekat dalam kepribadian dan ciri identitas diri pada etnis tersebut.

TABEL 3 PERSEBARAN ANGGOTA DPRD BERETNIS BUGIS DIDALAM PARTAI POLITIK

No	Partai							
	PKS	GOLKAR	PDIP	DEMOKRAT	PPP	PKB	GERINDRA	HANURA
1	Abdur rahman	Okta Hasanatang	Surya Lesmana	M.Sabit	Adi Chandra	Dani M nursalam	Mohd Sulo Lipu	NASDEM
2		M.Yusuf Said				Fadli	M. Wahyuddin	PAN
3		Edi Haryanto				Siti Bungatang		

RELASI DENGAN ETNIS LAIN (ETNIS JAWA)

Etnis Jawa dengan jumlah penduduk 16% (KKSS Inhil, 2015), akan tetapi faktanya hanya mendapat 2 (dua) kursi diparlemen, dan dengan tingkat rasio paling rendah yaitu 0,08. Menurut Bapak Andi Rusli (Komisi I DPRD Kab.Inhil) etnis jawa cenderung lebih berpihak pada etnis Bugis, terbukti dari konstituen beliau lebih dari 40% merupakan etnis Jawa. Menurut Andi Rusli dan beberapa rekan anggota DPRD yang beretnis Bugis M.Wahyuddin (Komisi II) dan M.sabit (Komisi III) kepercayaan yang etnis Jawa berikan kepada etnis Bugis, lebih kepada kedekatan simbiosismutualisme dalam mengelola perkebunan dan pertanian. Berimbang pada kepercayaan dalam pemilihan legislatif, dengan memberikan suaranya kepada calon legislatif yang beretnis Bugis.

RANAH DAN STRATEGIS

Pertama; strategi investigasi Biologi, menurut Ibuk sitti Bungatang (Komisi I DPRD Inhil) semua etnis di Indonesia tentu akan menjaga keberlangsungan eksistensi generasi etnisnya, begitupun pada etnis

Bugis. Secara garis besar yang terjadi di keluarga Bugis dalam mempertahankan generasinya yang secara tidak langsung merupakan strategi kuat untuk meneruskan generasinya di Parlemen. Dalam teori strategi Bourdieu dikenal istilah strategi kesuburan, dimana etnis Bugis memiliki target dalam membatasi keturunan untuk menjamin transmisi modal dengan cara tersebut, tetapi berdasarkan pengamatan Sitti Bungatang ini merupakan pergeseran nilai yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi.

10

Kedua; strategi Investasi Ekonomi, merupakan upaya mempertahankan atau meningkatkan berbagai jenis modal, yaitu akumulasi modal ekonomi dan modal sosial. Investasi modal sosial diharapkan mampu untuk melanggengkan dan membangun hubungan-hubungan sosial baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Hal ini berkaitan kuat dengan tradisi adat pernikahan, untuk menjaga harta atau kekayaan baik berupa nominal uang maupun lahan (tanah), yaitu dengan menikahkan anak dengan keluarga yang memiliki pertalian ikatan masih dekat. Dengan menjaga harta warisan biasanya lahan atau tanah yang luasnya berhektar-hektar tersebut untuk digunakan sebagai modal dalam pemilihan legislatif (pileg).

Ketiga; strategi edukatif, strategi ini bermaksud pada upaya menghasilkan anggota legislatif dan jabatan apapun itu yang dilakoni oleh setian individu atau kelompok etnis Bugis, yang dianggap layak dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu menerima warisan amanah yang telah dilalui oleh anggota-anggota sebelumnya yang beretnis serupa, untuk memperbaiki jenjang hierarki yang ada.

Keempat; strategi investasi simbolis, strategi ini menjadi sebuah upaya untuk melestarikan dan meningkatkan pengakuan sosial terhadap etnis Bugis baik berupa legitimasi ataupun bentuk penghormatan melalui apresiasi dengan properti nilai budaya yang melekat pada anggota-anggota yang beretnis Bugis.

Kelima; strategi suksesif, strategi ini ditujukan untuk menjamin agar tidak terjadi pengalihan posisi, dalam hal ini tentu jumlah suara yang diberikat oleh masyarakat atau konstituen kepada para calon anggota legislatif, yang dianggap mampu menjalankan tugasnya. Salah satu strategi suksesi yaitu berdasarkan daerah pemilihan (dapil) tiap-tiap calon yang akan maju. Sebab melihat data diatas ternyata persebaran etnis Bugis di Inhil tidak merata.

MODAL DALAM MEMBENTUK RELASI KUASA ETNIS BUGIS DI LEMBAGA LEGISLATIF

Anggota DPRD tersebut menempati posisi-posisi masing-masing tidak terlepas dari modal yang dimiliki baik modal budaya kultural, modal sosial, dan modal ekonomi yang dimilikny⁵ Secara umum pengaruh modal yang dimiliki dapat dilihat dari besarnya modal yang dimiliki, dan sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka. Untuk memahami bahwa sistem kepemilikan yang sama (yang menentukan posisi di dalam arena perjuangan kelas) memiliki unsur yang dapat menjelaskan, bahwa kumpulan modal yang terkait dengan faktor-faktor yang membentuknya sebagai anggota legislatif berbeda di satu arena dengan yang lain,

KESIMPULAN

Relasi kuasa identitas etnis pada lembaga legislatif Kabupaten Inhil sangat sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu dalam mekanisme reproduksi kekuasaan. Mulai dari habitus dalam membentuk relasi-relasi sehingga etnis Bugis mampu memiliki kuasa dalam lembaga legislatif terbukti dengan kedudukan dan perannya dalam kursi legislatif pada periode 2014-2019 sebesar 28,89% (13 kursi). Habitus yang terikat dalam ruang dan waktu serta kondisi material yang mengelilinginya, proses akumulasi perilaku yang terjadi tidak terlepas dari awal kedatangan periode pertama pada abad ke17, yang dilakukan oleh leluhur masyarakat etnis Bugis.

Pola hidup yang menjunjung nilai-nilai budaya masyarakat Bugis sesuai dengan nilai *taro'ada taro' gawu* dan menjunjung tinggi nilai kehormatan *siri'*. Terikat dalam ruang yang sama dan rentan waktu yang berbeda, masyarakat pendatang etnis Bugis memainkan perannya dengan baik, hidup bersosialisasi, bertahan hidup dan menempatkan diri ditengah-tengah kemajemukan masyarakat yang ada di Kabupaten Inhil

Ranah yang merupakan arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya-upaya dan strategi untuk memperebutkan modal sosial, yaitu kedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Serta upaya untuk memperoleh serta mempertahankan akses dengan hirarki kekuasaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Ranah dalam kedudukan (*posision*), dapat dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh dan jabatan pada komisi dan Badan pembentuka. Ranah sebagai arena kekuatan (*Forces*) yaitu karakter pemimpin yang melekat pada individu-individu tersebut, *isedangkan* ranah strategi, merupakan akumulasi 5 (lima) startegi baik strategi investasi biologi, investasi ekonomi, edukatif, sombolis, dan startegi suksesif.

Proses dan sejarah panjang yang telah dilewati, kemudian membentuk sistem disposisi yang tahan waktu dan diwariskan dari generasi kegenerasi, kemudian terakumulasi dengan modal-modal yang ada. Relasi yang terjalinpun beragam dari kompleksnya memproduksi relasi dalam kekuasaan pada etnis Bugis. Pencapaian posisi di lembaga legislatif yang merupakan akumulasi habitus pada identitas kelompok etnis tersebut, kemudian ranah yang berperan, dan kontribusi modal yang dimiliki mampu menjalin relasi dengan partai politik, etnis non Bugis (etnis Jawa), dan organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Rusdi J, *Demokrasi di Aras Lokal*, Yogyakarta, Cerah Media, 2012
Aboddin,

- Muhtar, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, Volume 3 No.1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012
- Aris Ananta, dkk. *Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective's Population Series*, No. 7, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
- Bourdieu, Pierre, *Arena Produksi Kultural*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2012
- Bourdieu, Pierre, *Distinction*, London, Routledge, 1984
- Castells, Manuel. *The Power Of Identity*, Volume II, Blackwell Publishing, 2001
- Daeng, Mangemba, *Takutlah Pada Orang Jujur*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Daeng, Muhammad Yusuf, *Orang Bugis di Semenanjung Melayu*, Riau, KKSS, 2008
- Fashri, Fauzi, *Kekerasan Simbolik Sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan Pierre Bourdieu*, UMY, 2007
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia, Sebuah Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Giddens, Anthony. *Modernity and Self-Identity*. California: Stanford, University Press, 1991
- Haji, Raja Ali, *Tuhfat Al-Nafis Sejarah Riau Lingga dan Taklukannya*, Riau, Yayasan Khazanah Melayu, 2002
- Hariyatmoko, E. *7 a Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Kompas, 2003
- Hariyatmoko, *Meny 5 gkap Kepalsuan Budaya Penguasa*, Jurnal, No 11-12, 2003
- _____, *Habitus Dan Kapital Dalam Strategi Kekuasaan: Teori trukturasi Pierre Bourdieu dengan Orientasi Budaya*, Univeritas Indonesia, Jakarta, 2010
- Hidayat, imam, *Teori - Teori Politik*, Malang, SETARA press, 2009.
- Jenkins, Richard, *Pierre Bourdieu*, Londen, New York, 1992
- Kesuma, Andi ima, *Migrasi dan Orang Bugis*, Yogyakarta, Ombak, 2004
- Ma'arif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS, 2004
- Rahim, A Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Yogyakarta, Ombak, 2011
- Ramstedt, Martin, Thufail, Fajar Ibnu, *Kegagalan Identitas*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2011
- Ridha, Muhammad. *Nilai-nilai Kepemimpinan Sunda: Politik Identitas Masyarakat Sunda*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2014
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, cetakan ketiga, 2009
- Schultz, dkk, *Anthropology, A Perspective on the Human Condition*, Third Edition. USA, St. Cloud State University, 2001
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006
- Sjaf, Sofyan, *Politik Etnik Dinamika Politik Lokal di Kendari*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Dikabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau)

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	alisahab09-fisip.web.unair.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
3	antropologimakassar.blogspot.com Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	journal.isi.ac.id Internet Source	1%
6	patuhorangindonesia.blogspot.com Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	sindikridayanti.blogspot.com Internet Source	1%
9	socialmasterpice.blogspot.com Internet Source	1%
10	media.neliti.com Internet Source	1%
11	religio.uinsby.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On